

ALASAN INDONESIA MENGHENTIKAN EKSPOR BIJIH BAUKSIT KE TIONGKOK TAHUN 2023

Praba Al-kausar H. Gunawan¹, Enny Fathurachmi²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis alasan pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan penghentian ekspor bijih bauksit ke Tiongkok pada tahun 2023. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara sebagai bentuk konsistensi pemerintah dalam mewujudkan serta melindungi industri dalam negeri melalui pendekatan proteksionisme dengan konsep *infant industry*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penghentian ekspor bauksit dilakukan untuk tidak ketergantungan terhadap ekspor bijih bauksit, melindungi industri pengolahan bauksit dalam negeri, mengurangi impor aluminium serta meningkatkan nilai tambah dari bijih bauksit. Sehingga penghentian ekspor bijih bauksit merupakan langkah strategis untuk menguatkan ekonomi nasional dan mendorong transformasi menjadi negara industri berbasis sumber daya alam dan strategi dalam mencapai kedaulatan ekonomi dan memperkuat industri pengolahan domestik dengan memanfaatkan sumber daya alam.

Kata kunci: Bauksit, Proteksionisme, *Infant Industry*, Undang-Undang No.3 Tahun 2020.

Abstract

This study aims to explain and analyze the reasons behind the Indonesian government's policy to halt bauxite ore exports to China in 2023. The policy is an implementation of Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal as a form of the government's consistency in realizing and protecting domestic industries through a protectionist approach based of the infant industry concept. This research uses a qualitative method with data collection techniques through literature studies. The result show that bauxite exports ban was implemented to reduce dependence on raw bauxite exports, protect the domestic bauxite processing industry, decrease aluminium imports, and increase the added value of bauxite ore. Therefore, the cessation of bauxite ore exports represents a strategic step to strengthen the national economy, encourage transformation towards a resource-based industrial nation, and serve as a strategy to achieve economic sovereignty while reinforcing domestic processing industries by utilizing natural resources.

Keywords: Bauxite, Protectionism, *Infant Industry*, Law of number 3 of 2020.

1. PENDAHULUAN

Penghentian ekspor bijih bauksit Indonesia merupakan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2023, dari kebijakan ini pemerintah Indonesia mewajibkan kepada pengusaha pertambangan di Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan ekspor bijih bauksit dan harus menjual bijih bauksit tersebut kepada pengusaha pengolahan bauksit di Indonesia. kebijakan penghentian ekspor bijih bauksit ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Mineral dan Batu Bara No. 3 Tahun 2020 yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Mineral dan Batu bara No. 4 Tahun 2009.

Secara potensi Indonesia merupakan salah satu negara penghasil bauksit terbesar di dunia, dimana bauksit merupakan bahan mentah untuk membuat alumina dan dapat diproses

menjadi aluminium, dan logam ringan lainnya. Pada tahun 2022 cadangan bauksit Indonesia mencapai 6,6 miliar ton bijih dan 1,1 miliar ton logam, atau sekitar 4 persen dari total cadangan bauksit dunia yang mencapai 30,3 miliar ton. Dalam pemanfaatannya sebagian besar produksi bijih Indonesia dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan ekspor, dan Tiongkok merupakan satu-satunya tujuan pasar ekspor Indonesia. Kemudian pada tahun 2022 dari total produksi mencapai 28 juta ton, sekitar 17,84 juta ton, dan sekitar 7 juta ton untuk memenuhi kebutuhan domestik (Kementerian ESDM, 2022).

Kebijakan penghentian ekspor bijih bauksit ini pertama kali diberlakukan pada tahun 2014 melalui Undang-Undang Mineral dan Batu Bara No. 4 Tahun 2009, tujuan dari kebijakan ini merupakan upaya pemerintah Indonesia pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mewujudkan kemandirian industri nasional dengan mampu mengelola sumber daya alam dengan penguasaan negara atas sumber daya strategis. Namun kebijakan ini tidak berjalan efektif karena keterbatasan infrastruktur dan kesiapan industri pengolahan dikarenakan hanya terdapat satu smelter pengolahan yang beroperasi yaitu milik PT Indonesia Chemical Alumina yang hanya mampu menyerap 300 ribu ton bijih bauksit (Tempo, 2023).

Pada tahun 2017 pada masa pemerintahan Joko Widodo, pemerintah melonggarkan kebijakan penghentian ekspor bijih bauksit melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 5 Tahun 2017 dengan membuka kembali ekspor bijih bauksit dengan beberapa ketentuan yang telah diberlakukan, seperti mewajibkan perusahaan pertambangan bauksit untuk membangun fasilitas pengolahan bijih bauksit (*smelter*), bauksit yang dapat diekspor yaitu bauksit dengan kadar Al_2O_3 lebih dari 42 persen dan perusahaan tambang bauksit diwajibkan membayar bea keluar sebesar 20 persen dan mengikuti kuota ekspor yang telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan kapasitas produksi dan kemajuan pembangunan *smelter* (Bambang, 2017).

Kemudian pada tahun 2020 pemerintah Indonesia kembali mengesahkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, Undang-Undang ini menegaskan larangan ekspor mineral mentah termasuk bauksit berlaku maksimal tiga tahun setelah Undang-Undang tersebut diundangkan, dan pada juni 2023 pemerintah Indonesia resmi menghentikan seluruh kegiatan ekspor mineral mentah termasuk bauksit ke Tiongkok yang merupakan satu-satunya pasar tujuan ekspor bijih bauksit Indonesia.

2. METODE

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif sendiri bertujuan untuk menemukan penjelasan mengenai mengapa suatu kejadian atau fenomena sosial dan politik yang terjadi (Sitoresmi. A. R, 2024). Sehingga dalam penelitian ini penulis berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai mengapa pemerintah Indonesia menghentikan ekspor bijih bauksit ke Tiongkok pada tahun 2023.

Fokus dari penelitian ini yaitu untuk mencari tahu alasan mengapa pemerintah Indonesia menghentikan ekspor bijih bauksit ke Tiongkok pada tahun 2023 dengan pertimbangan terhadap kondisi-kondisi yang terjadi disepanjang tahun 2017 hingga 2023. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara, dan data sekunder yang berperan sebagai penunjang dari data primer, berupa literatur jurnal, artikel, skripsi, dan situs internet yang berkenaan mengenai penelitian yang dilakukan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka berupa penelaahan dan pengkajian terhadap dokumen-dokumen. Seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara, buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu. Kemudian teknik analisis data pada penelitian ini adalah Teknik analisis data kualitatif dengan menekankan pengumpulan data non-numerik serta eksplorasi perspektif dan pengalaman suatu subjek. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi lengkap mengenai alasan penghentian ekspor bijih bauksit Indonesia ke Tiongkok pada tahun 2023.

a. Teori Proteksionisme

Penelitian ini menggunakan teori proteksionisme yang dikemukakan oleh Friedrich List, menurut Friedrich List Negara memiliki peran penting dalam bidang ekonomi untuk melindungi dan memperbesar kekuatan produktivitas nasional melalui pengembangan industri, yang dimana industri tersebut berhubungan erat dengan teknologi, politik, perbaikan infrastruktur, urbanisasi, dan alat mencapai kesejahteraan. Pada proteksionisme terdapat beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintahan suatu negara seperti memberlakukan tarif impor, mengatur kuota ekspor dan impor, melakukan pembatasan secara administratif, memberlakukan undang-undang, melakukan subsidi ekspor, memberlakukan pembatasan terhadap pekerja migran, dan melakukan kampanye dalam mendorong

penggunaan produk dalam negeri. Kemudian menurut Friedrich List terdapat tiga gagasan utama dalam proteksionisme yaitu gagasan terhadap *infant industry*, *force capital investment* dan *national interest*, dan pada penelitian ini penulis menggunakan gagasan *infant industry* (Friedrich List, dari Fathun L. M, 2017).

b. Gagasan *infant industry*

Menurut Friedrich List, Gagasan proteksionisme terhadap *Infant Industry*, berpandangan bahwa suatu negara yang baru mengembangkan dalam bidang industrinya dapat berpotensi kurang menguntungkan pada saat negara tersebut berhadapan dengan negara-negara maju. Industri negara maju jauh lebih unggul karena adanya dukungan dari pengembangan riset dan modal yang memadai apabila dibandingkan dengan industri baru terutama pada negara berkembang. Sehingga pembangunan dari industri baru tersebut akan kesulitan untuk berkembang karena terjadinya kesulitan dalam bersaing terhadap industri negara maju.

Oleh karena itu menurut Friedrich List dibutuhkan solusi dalam menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional, dimana negara harus memiliki peran yang penting dalam menciptakan kompetisi bagi industri dalam negerinya untuk menghadapi persaingan perdagangan internasional. Pemerintah perlu memberlakukan kebijakan terhadap kontrol ekspor dan impor terhadap negara-negara maju, kemudian pemerintah juga perlu memberikan jaminan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dalam negerinya, dan hukum tersebut harus diimplementasikan dengan tepat dan dapat menguntungkan industri dalam negerinya.

3. ALASAN INDONESIA MENGHENTIKAN EKSPOR BIJIH BAUKSIT KE TIONGKOK TAHUN 2023

Menghilangkan Ketergantungan Ekspor Bijih Bauksit Indonesia

Salah satu tujuan dari diberlakukannya kebijakan penghentian ekspor bijih bauksit ke Tiongkok adalah karena tingginya ketergantungan Indonesia terhadap ekspor bahan mentah yaitu bijih bauksit dan terbatasnya pasar dalam mengeksport bijih bauksit, sebanyak 90 persen total ekspor bijih bauksit Indonesia dikirim menuju Tiongkok. Tiongkok sendiri merupakan negara dengan produsen aluminium terbesar di dunia dengan penguasaan lebih dari 50 persen kapasitas global atau 45 juta ton pertahunnya. Hal tersebut menyebabkan Tiongkok membutuhkan pasokan bauksit dari negara lain seperti Guinea, Australia, dan Indonesia, dimana bauksit Indonesia berperan memenuhi 17 persen kebutuhan bauksit Tiongkok. Walaupun Tiongkok memiliki cadangan bauksit, kualitas bauksit Tiongkok yang rendah menyebabkan Tiongkok harus mengimpor dari negara lain (Maidi, 2022).

Pada tahun 2022 volume ekspor bijih bauksit Indonesia mencapai sekitar 17,84 juta ton, sehingga hal tersebut menghasilkan devisa negara sebesar USD 623 juta, hal tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia masih belum mampu memanfaatkan bauksit secara optimal, dan Indonesia hanya menjual dalam bentuk bijih bauksit. Sementara Tiongkok yang merupakan negara pengimpor mengolahnya menjadi alumina dan aluminium dengan nilai yang jauh lebih tinggi, hal tersebut memperlihatkan bahwa potensi bauksit di Indonesia belum bisa memberikan kontribusi banyak terhadap nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan penguasaan teknologi pengolahan bauksit (CNBC, 2023).

Terbatasnya pasar alternatif menjadikan Tiongkok satu-satunya negara tujuan ekspor bijih bauksit Indonesia, negara-negara lain yang memiliki produksi bauksit lebih besar dari Indonesia seperti Australia, Guinea, dan Brazil memiliki pasarnya tersendiri yaitu Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Kemudian perbedaan kualitas bauksit Indonesia yang sebagian besar berkualitas sedang yaitu dengan kadar antara 40 hingga 45 persen aluminium oksida membuat alternatif pasar Indonesia sangat terbatas. Hal tersebut berbeda dengan Australia, Brazil dan Guinea yang memiliki kadar bauksit dengan kualitas tinggi yaitu sekitar 55 hingga 60 persen aluminium oksida, dimana negara-negara tersebut memiliki jangkauan pasar yang lebih luas seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan (Tempo, 2023).

Ketergantungan pada satu pasar utama juga dapat menimbulkan permasalahan terhadap keberlanjutan sektor pertambangan nasional, dimana kebijakan penghentian ekspor bijih bauksit tersebut bukan hanya bertujuan untuk mendorong industrialisasi dalam negeri, tetapi juga sebagai Langkah untuk membangun diversifikasi atau memperluas pasar dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Sehingga dalam hal ini dapat membangun struktur ekonomi yang lebih kuat dan mampu menentukan arah pembangunan dalam negeri (Suradinata. E, 2025).

Melindungi Industri Pengolahan Bauksit Dalam Negeri

Sebelum tahun 2020, Indonesia hanya memiliki 2 smelter utama pengolahan bauksit yang beroperasi yaitu PT Indonesia Chemical Alumina di Sanggau, Kalimantan Barat yang beroperasi pada tahun 2015, kemudian PT Well Harvest Winning Alumina Refinery di Ketapang, Kalimantan Barat yang beroperasi pada tahun 2016. Hingga tahun 2023 *smelter* utama yang menjadi tempat pengolahan bijih bauksit di Indonesia bertambah menjadi empat. Keempat *smelter* tersebut adalah *smelter* dari PT Bintang Alumina Indonesia di Galang, Batang,

Kepulauan Riau, dan PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Kalimantan Barat, dan masih terdapat tujuh *smelter* lainnya yang sedang dalam proses pembangunan.

Meski demikian kapasitas yang tersedia dari keempat *smelter* tersebut masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan volume produksi bijih bauksit nasional, *smelter* pengolahan bijih bauksit hanya memiliki daya serap mencapai 13,88 juta ton per tahunnya. Jumlah tersebut masih jauh dibandingkan dengan produksi bijih bauksit nasional yang mencapai kurang lebih 28 juta ton pada tahun 2022, sehingga masih terdapat selisih sekitar 13,86 juta ton bijih bauksit yang tidak dapat terserap oleh fasilitas pengolahan bijih bauksit di Indonesia. Kemudian proyek pembangunan *smelter* tersebut sebagian besar masih mengalami berbagai permasalahan sehingga pembangunan *smelter* tersebut berjalan lambat yang diakibatkan dari berbagai macam tantangan seperti membutuhkan dana investasi yang besar karena pembangunan satu *smelter* membutuhkan dana antara USD 800 Juta hingga USD 1,5 Miliar, kemudian adanya hambatan birokrasi karena sulitnya perizinan, dan keterbatasan infrastruktur penunjang seperti pembangkit Listrik, pelabuhan logistik, dan transportasi (Ari. N, 2024).

Selain itu juga hasil produksi bijih bauksit Indonesia sebagian besar digunakan sebagai komoditas ekspor menyebabkan kurangnya penyerapan bijih bauksit Indonesia terhadap pabrik pengolahan bijih bauksit dalam negeri, hal tersebut dikarenakan mengekspor bijih bauksit lebih menguntungkan pengusaha pertambangan daripada harus mengolah di dalam negeri terlebih dahulu. Adapun beberapa alasan mengapa mengekspor bijih bauksit sangat menguntungkan dibandingkan dengan mengolah bijih bauksit di dalam negeri. Oleh karena itu melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 pemerintah Indonesia berupaya untuk menjaga ketersediaan bahan baku yaitu bijih bauksit agar dapat digunakan secara optimal oleh industri pengolahan bauksit dalam negeri. Banyaknya bijih bauksit yang dipergunakan untuk ekspor berdampak terhadap kurangnya bijih bauksit yang berkualitas untuk diolah oleh *smelter* di dalam negeri. Sehingga melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan semua ekspor bijih bauksit agar fasilitas pengolahan bijih bauksit di dalam negeri dapat mengolah bijih bauksit yang berkualitas dan menciptakan kemandirian industri pengolahan bauksit dalam negeri dengan menjaga ketersediaan bahan baku (Kementerian Keuangan, 2023).

Kemudian disisi pasar, ekspor bijih bauksit sangat menguntungkan karena Tiongkok memiliki permintaan yang besar dan dapat menyerap sebagian besar produksi bijih bauksit Indonesia. Harga ekspor yang stabil yaitu sekitar USD 35 hingga 45 per tonnya dibandingkan

dengan menjual ke pabrik pengolahan bauksit Indonesia yang mengikuti standar Harga Patokan Mineral (HPM) yang berada di harga USD 28 hingga 31 per tonnya. Selain itu, kondisi geografis antara Indonesia dan Tiongkok yang strategis sangat menguntungkan bagi pengusaha pertambangan bauksit di Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan industri pengolahan bauksit di Indonesia, walaupun dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar, dibutuhkan waktu yang sangat panjang agar pengusaha dapat mencapai titik balik modal yang dapat membutuhkan waktu hingga sepuluh tahun (Tirto, 2022).

Oleh karena itu jika ekspor tetap dibuka, perusahaan pertambangan akan lebih memilih untuk mengekspor bijih bauksit ke Tiongkok daripada menginvestasikan modal yang besar dalam membangun fasilitas pengolahan bijih bauksit yang membutuhkan waktu yang lama. Sehingga dengan adanya larangan ekspor bijih bauksit, perusahaan pertambangan bauksit di Indonesia harus mengalihkan penjualan bijih bauksitnya dengan bekerja sama terhadap perusahaan industri pengolahan bijih bauksit dalam negeri atau membangun fasilitas pengolahan bijih bauksit sendiri. Sehingga kebijakan penghentian ekspor bijih bauksit ini juga membuat perusahaan pertambangan bauksit tidak memiliki alternatif selain berinvestasi dalam mengolah bijih bauksit (Sucofindo, 2024).

Upaya Untuk Mengurangi Impor Aluminium

Aluminium merupakan produk akhir dari proses pengolahan bijih bauksit, pada tahun 2023, Kebutuhan Indonesia terhadap aluminium sebesar kurang lebih 1 juta ton selain itu Indonesia memiliki keterbatasan dalam produksi aluminium domestik yaitu dengan kapasitas 250.000 ton dengan daya serap alumina mencapai kurang lebih 500 ribu ton per tahunnya. Aluminium tersebut hanya diproduksi oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) sebagai satu-satunya produsen aluminium di Indonesia. Angka tersebut masih jauh dari kebutuhan domestik aluminium Indonesia yang mencapai kurang lebih dari 1 juta ton aluminium per tahunnya, sehingga Indonesia harus mengimpor aluminium dalam jumlah besar setiap tahunnya. Selain PT INALUM terdapat satu pabrik peleburan aluminium yang sedang dalam proses pembangunan yaitu PT Kalimantan Aluminium Industri yang merupakan anak perusahaan dari PT Adaro Mineral Indonesia, pabrik ini berlokasi di Tanah Kuning, Kalimantan Utara dan diperkirakan dapat beroperasi paling lambat pada bulan Desember 2025 dengan kapasitas produksi 500 ribu ton per tahunnya (Alwepo, 2024).

Pada tahun 2022 impor aluminium Indonesia mencapai dengan volume sebesar 724.746 ton, kemudian menurun pada 2023 menjadi 707.999 ton. Namun demikian, nilai impor secara

finansial tetap tinggi. Pada tahun 2023, total nilai impor aluminium Indonesia mencapai USD 2 miliar atau setara dengan Rp 31,14 triliun. Data ini memperlihatkan beban devisa yang harus ditanggung oleh negara akibat ketergantungan terhadap produk aluminium luar negeri. Lebih dari 38,34 persen dari total impor dengan nilai mencapai USD 729 juta tersebut berasal dari Tiongkok, menandakan bahwa Indonesia masih sangat tergantung pada negara tersebut tidak hanya sebagai tujuan ekspor bijih bauksit tetapi juga sebagai pemasok produk aluminium olahan. Selain Tiongkok terdapat beberapa negara lain yang menjadi pemasok aluminium di Indonesia seperti Australia dengan jumlah impor mencapai 62,22 ribu ton, Malaysia dengan volume impor mencapai 61,24 ribu ton, dan Uni Emirate Arab dengan volume impor mencapai 45,9 ribu ton aluminium (Databooks, 2024).

Upaya Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Bijih Bauksit

Dengan menerapkan kebijakan penghentian ekspor bijih bauksit ke Tiongkok, meningkatkan nilai tambah bijih bauksit menjadi salah satu strategi utama pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Bijih bauksit sebagai bahan mentah memiliki nilai yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan produk olahan seperti alumina dan aluminium. Produk olahan tersebut memiliki perbedaan harga yang sangat signifikan, harga ekspor bijih bauksit mentah hanya memiliki harga sekitar USD 35 hingga 45 per tonnya, sementara itu harga jual alumina bisa mencapai USD 400 hingga 500 per ton dan aluminium Batangan memiliki harga antara USD 2000 hingga 2500 per tonnya. Melalui potensi tersebut perusahaan pengolahan bauksit di Indonesia didorong untuk berinvestasi dalam pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan, sehingga dapat menjadi produsen produk bernilai tinggi. Dimana kebijakan ini juga bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia dari yang bergantung terhadap sumber daya mentah menjadi ekonomi industri yang kompetitif. Dengan pelarangan ekspor tersebut membuat pengusaha terdorong untuk melakukan investasi dalam membangun *smelter* di dalam negeri (Sekretariat Kabinet, 2024).

Dengan upaya untuk meningkatkan nilai tambah tersebut, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 12 *smelter* hingga tahun 2025, yang diharapkan dapat menyerap hingga 41 juta ton bijih bauksit per tahun dan menghasilkan alumina dalam jumlah besar dalam memenuhi kebutuhan aluminium nasional. Selain itu kebijakan ini juga berpotensi dalam meningkatkan lapangan pekerjaan baru, pemerataan pembangunan industri termasuk pembangunan infrastrukturnya, selain itu proses industrialisasi ini juga dapat mendukung transfer teknologi dari perusahaan asing yang berinvestasi terhadap bauksit di Indonesia dan

dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan industri bauksit di Indonesia (Sucofindo, 2024).

Oleh karena itu kebijakan penghentian ekspor bijih bauksit ke Tiongkok pada tahun 2023 memiliki dampak yang sangat strategis terhadap pembangunan industri terutama industri pengolahan bauksit nasional. Dimana jika sebelumnya sektor pertambangan bauksit di Indonesia lebih berfokus terhadap penjualan bahan mentah ke pasar luar negeri terutama menuju Tiongkok. Dimana dalam hal ini industri bauksit Indonesia yang masih baru dalam tahap pertumbuhan perlu mendapatkan dukungan dan perlindungan dari negara terhadap persaingan industri global agar dapat berkembang dan dapat mencapai daya saing yang berkelanjutan (Asriatunnisyah. M. P, 2024).

4. KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan penghentian ekspor bijih bauksit yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia masih belum sepenuhnya optimal. Namun dari kebijakan ini terlihat upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan strategis, dalam menciptakan kemandirian ekonomi, melindungi industri dalam negeri, meningkatkan nilai tambah, dan penguatan posisi Indonesia dalam perdagangan global. Walaupun terdapat tantangan dalam implementasinya, penghentian ekspor bijih bauksit tersebut menunjukkan pola yang semakin tegas, dimana pada tahun 2014 penghentian ekspor masih bersifat transisi dan belum optimal karena kurangnya kepastian hukum, terjadinya tumpang tindih antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan belum optimalnya fasilitas industri pengolahan bauksit sehingga walaupun kebijakan penghentian ekspor tersebut telah diberlakukan, masih terdapat sejumlah bijih bauksit yang dapat diekspor dengan kuota yang telah ditetapkan.

Maka pada tahun 2023, pemerintah Indonesia mempertegas larangan ekspor melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 sehingga tidak ada sama sekali bijih bauksit yang dapat diekspor menuju Tiongkok. Selain itu juga adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan membangun beberapa fasilitas pengolahan bauksit di dalam negeri sebagai upaya untuk mencapai kemandirian dalam mengolah dan mengurangi ekspor bahan mentah walaupun pada implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan keterbatasan kapasitas industri, sulitnya akses terhadap infrastruktur pendukung, hambatan investasi dan perizinan, dan dampak sosial serta ekonomi yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflaha, A. (2022). RI Larang Ekspor Bauksit, Negara Importir China Bakal Merana? <https://www.cnbcindonesia.com/research/20221124172429-128-390989/ri-larang-ekspor-bauksit-negara-importir-china-bakal-merana>.
- Alfariyani, C. A. (2024). Potensi Hilirisasi Aluminium di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Industri Smelter. <https://www.diklatkerja.com/blog/potensi-hilirisasi-aluminium-di-indonesia-tantangan-dan-peluang-dalam-pengembangan-industri-smelter>.
- Annualreport. (2019). Antam Resmi Kuasai 100% Saham Perusahaan Alumina. <https://annualreport.id/info/antam-resmi-kuasai-100-saham-perusahaan-alumina>.
- AP3I. (2017). Ekspor Mineral Mentah Kembali Dibuka, Ini Penjelasan ESDM. <https://www.ap3i.or.id/News/News-Update/Ekspor-Mineral-Mentah-Kembali-Dibuka-Ini-Penjelasan-ESDM.html>.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020>.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Produksi Barang Tambang Mineral, 2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTA4IzI=/produksi-barang-tambang-mineral.html>.
- Benarnews. (2022). Indonesia larang ekspor bauksit per Juni 2023, dorong produksi domestik. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/pelarangan-ekspor-bauksit-12212022130649.html>.
- Cahyaningrum, D. (2023). Larangan Ekspor Sumber Daya Alam Mineral Mentah: Nikel dan Bauksit. Vol. XV, No. 4. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-4-II-P3DI-Februari-2023-2081.pdf.
- CNBC. (2023). Ekspor Disetop Juni 2023, Butuh 12 Smelter Tampung Bauksit RI. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103140639-4-402416/ekspor-disetop-juni-2023-butuh-12-smelter-tampung-bauksit-ri>.
- CNBC. (2023). Terungkap! 90% Bauksit RI Ternyata Larinya ke China. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230302085116-4-418181/terungkap-90-bauksit-ri-ternyata-larnya-ke-china>.
- Dwi, A. (2025). UU Nomor 3 Tahun 2020, Regulasi Pertambangan Indonesia. <https://listrikindonesia.com/detail/16598/uu-nomor-3-tahun-2020-regulasi-pertambangan-indonesia>.
- Ekonomi. (2024). 13,86 Juta Ton Bauksit Bakal Tak Terserap, Ekspor Rp7,7 Triliun Melayang. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240213/44/1740520/1386-juta-ton-bauksit-bakal-tak-terserap-ekspor-rp77-triliun-melayang>.
- Era. (2022). Daerah Penghasil Bauksit di Indonesia, dan Negara dengan Produksi Terbesar di Dunia. <https://era.id/news/113062/daerah-penghasil-bauksit-di-indonesia-dan-negara-dengan-produksi-terbesar-di-dunia>.
- Indrawan, R. (2020). 2020, Produksi Aluminium Inalum Menurun. <https://www.dunia-energi.com/2020-produksi-aluminium-inalum-menurun/>.
- Katadata. (2024). China, Pemasok Utama Aluminium ke Indonesia pada 2023. <https://databoks.katadata.co.id/perdagangan/statistik/83d2b5596e2256a/china-pemasok-utama-aluminium-ke-indonesia-pada-2023>.
- Kementerian Keuangan. (2023). Meneropong Larangan Ekspor Bijih Bauksit. <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-pontianak/artikel/meneropong-larangan-ekspor-bijih-bauksit-922955>.

- Kementerian PUPR. (2022). Pemerintah Putuskan Larang Ekspor Bijih Bauksit Mulai Juni 2023. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/pemerintah-putuskan-larang-ekspor-bijih-bauksit-mulai-juni-2023>.
- Kontan. (2024). Menteri ESDM: Pemerintahan Baru akan Kebut Proyek Smelter Bauksit. <https://industri.kontan.co.id/news/menteri-esdm-pemerintahan-baru-akan-kebut-proyek-smelter-bauksit>.
- Kumparan. (2023). ESDM Sebut Pengembangan Smelter Bauksit Masih Mandek. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/esdm-sebut-pengembangan-smelter-bauksit-masih-mandek-210yMXosUTP>.
- Kumparan. (2023). RI Butuh 8 Smelter seperti Inalum untuk Serap 3,9 Juta Ton Alumina Lokal. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ri-butuh-8-smelter-seperti-inalum-untuk-serap-3-9-juta-ton-alumina-lokal-1zuU49SmOMA>.
- Lederer, G. W. (2016). Resource Nationalism in Indonesia Effects of the 2014 Mineral Export Ban. <https://pubs.usgs.gov/publication/fs20163072>.
- Meilanova, D. R. (2023). Jokowi Resmi Setop Ekspor Bauksit, Cadangan RI Terbesar ke-6 di Dunia. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230612/44/1664469/jokowi-resmi-setop-ekspor-bauksit-cadangan-ri-terbesar-ke-6-di-dunia>.
- Mustajab, R. (2023). Ekspor Bauksit Indonesia Capai US\$623 Juta pada 2022. <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/ekspor-bauksit-indonesia-capai-us623-juta-pada-2022>.
- Sekretaris Kabinet. (2024). President Jokowi: Bauxite Downstreaming, Step towards Indonesia as Industrial Country. <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-bauxite-downstreaming-step-towards-indonesia-as-industrial-country/>.
- Setiabudi, P. (2025). Indonesian Bauxite and Aluminum Outlook. https://www.petroindo.com/storage/files/research/Indonesian-Bauxite_and_Aluminum_Outlook.pdf.
- Sitoresmi, A. R. (2024). Apa Itu Eksplanatif: Pengertian, Jenis, dan Contoh Penelitian. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5801601/apa-itu-eksplanatif-pengertian-jenis-dan-contoh-penelitian?page=13>.
- Suara. (2025). Produksi Bauksit Nasional di Fase Kritis, Sharon: Pembangunan Smelter Dalam Negeri Belum Optimal. <https://www.suarapemredkalbar.com/read/nasional/02052025/produksi-bauksit-nasional-di-fase-kritis-sharon-pembangunan-smelter-dalam-negeri-belum-optimal>.
- Sucofindo. (2024). Melacak Perkembangan Smelter Bauksit di Indonesia. <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/smelter-bauksit/>.
- Tempo. (2020). Ekspor Bijih Bauksit Dilarang, Pendapatan Negara Naik Jadi Rp 62 Triliun. <https://swa.co.id/read/381481/ekspor-bijih-bauksit-dilarang-pendapatan-negara-naik-jadi-rp-62-triliun>.
- Tempo. (2024). Waswas Akibat Minim Smelter. <https://www.tempo.co/ekonomi/kenapa-minim-smelter-bauksit-buat-waswas-827706>.
- Wahyudi, N. A. (2022). Jokowi Larang Ekspor Bauksit, Airlangga: RI Baru Punya 4 Smelter. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221221/44/1610733/jokowi-larang-ekspor-bauksit-airlangga-ri-baru-punya-4-smelter>.
- Wahyudi, N. A. (2023). Ekspor Bauksit Mau Disetop, Kapasitas Smelter Baru Capai 13,88 Juta Ton. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230130/44/1623098/ekspor-bauksit-mau-disetop-kapasitas-smelter-baru-capai-1388-juta-ton>.